

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah jelas akan membawa dampak perubahan dalam pola pengelolaan (manajemen) keuangan pemerintahan. Salah satu perubahan dimaksud diantaranya adalah diberikannya kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan kewajibannya dengan baik atau tidak adalah dengan pengukuran kinerja. Seperti yang kita ketahui pengukuran kinerja pemerintah daerah sangat berbeda dengan pengukuran kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah lebih sulit dibandingkan dengan pengukuran kinerja perusahaan, mengingat pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan,

jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, kita dapat menggunakan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rasio keuangan sebagai alat ukurnya.

Dalam APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan dibagi menjadi tiga kategori lagi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*), antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau yang lebih dikenal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa PAD inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat.

Penelitian ini mereplik penelitian Florida (2006) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara. Florida (2006) membuktikan bahwa PAD berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara dan secara parsial hanya pajak

daerah dan penerimaan lain-lain yang sah yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara, sedangkan retribusi dan laba BUMD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara.

Dengan menggunakan rasio kemandirian seperti yang digunakan oleh Florida (2006) peneliti meneliti pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Florida (2006) adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian Florida (2006) berada di Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatra Utara dengan rentang waktu mulai tahun 2001 sampai dengan 2005, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan rentang waktu mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan analisis dan pengkajian yang lebih mendalam kaitannya dengan PAD dan kinerja keuangan suatu daerah. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti mengambil judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah Lain-lain PAD yang Sah dan Bukan Pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan membuktikan secara empiris bahwa:

1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
2. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
4. Lain-lain PAD yang Sah dan Bukan Pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk memperdalam penguasaan ilmu Akuntansi yang sudah diterima selama kuliah.

2. Bagi Pihak Luar

- a. Sebagai informasi kepada publik dan manajemen Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai kinerja keuangan
- b. Sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya tentang kinerja keuangan pemerintah daerah

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan, materi skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

- 1. Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

- 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu telaah teori dan pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual atau model penelitian.

- 3. Metoda Penelitian**

Dalam metoda penelitian akan dibahas desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional

variabel, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

4. Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

5. Simpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang akan datang.